



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor ...

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui Swakelola dan/atau Penyedia Barang/Jasa.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat .
14. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang Bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
15. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
16. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
18. Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/atau masyarakat desa sekitar lainnya.
19. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan Barang/jasa.
20. Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.
21. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK.

22. Lelang ...

22. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat.
23. Swakelola adalah cara memperoleh Barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.
24. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
25. Pembinaan Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi proses pembentukan peraturan Bupati, konsultasi dan bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan.
29. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
30. Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat dengan PBJ adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa.
31. Swakelola adalah kegiatan PBJ dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
32. Tim Pelaksana Kegiatan PBJ yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat untuk melaksanakan PBJ.

33. Barang ...

33. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
34. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
35. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Surat Perjanjian adalah perjanjian tertulis antara TPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
36. Rencana Anggaran Biaya Pengadaan yang selanjutnya disebut RAB Pengadaan adalah perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan proyek, dalam sebuah tender PBJ.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
38. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang menginformasikan latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan struktur sebuah kegiatan yang telah disusun oleh Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan PBJ yang dibiayai dengan menggunakan APBDes.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar PBJ yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip PBJ di Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) PBJ di Desa pada prinsipnya dilakukan dengan cara Swakelola oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong

royong ...

royong, memanfaatkan kearifan lokal, serta memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

- (2) Tahapan dalam PBJ di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap perencanaan (persiapan), pelaksanaan, pengawasan, dan serah terima hasil pekerjaan.
- (3) Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi tidak sederhana yaitu Pekerjaan Konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola.
- (4) PBJ di Desa yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia yang dianggap mampu.

BAB IV

TATA NILAI PENGADAAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 5

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
- d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;

f. gotong-royong ...

- f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
- g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
- h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan
- i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Tata Nilai Pengadaan

Pasal 6

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.

BAB V

RUANG LINGKUP PENGADAAN

Pasal 7

- (1) Pengadaan merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APB Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk:

- a. mendukung Swakelola; atau
- b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.

BAB VI

PIHAK

Bagian Kesatu

Para Pihak Dalam Pengadaan

Pasal 9

Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari:

- a. Kepala Desa;
- b. Kasi/Kaur;
- c. TPK;
- d. Masyarakat; dan
- e. Penyedia.

Bagian Kedua

Kepala Desa

Pasal 10

Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:

- a. menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
- b. mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan

c. menyelesaikan ...

- c. menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Bagian Ketiga
Kepala Seksi/Kepala Urusan

Pasal 11

- (1) Kasi/Kaur mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaan:
 - a. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
 - b. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;
 - c. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan Musrenbangdes;
 - d. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
 - f. menerima hasil Pengadaan;
 - g. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
 - h. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
- (3) Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Surat Perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
- (4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 12

- (1) TPK terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang.

(3) Berdasarkan ...

- (3) Berdasarkan pertimbangan kompleksitas Pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Organisasi TPK terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (5) Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:
 - a. melaksanakan Swakelola;
 - b. menyusun dokumen Lelang;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- (6) Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.
- (7) TPK dapat diberikan honor sesuai dengan kemampuan keuangan desa paling tinggi 3% (tiga per seratus) dari nilai kegiatan yang dilaksanakan.

Bagian Kelima

Masyarakat

Pasal 13

Peran serta masyarakat dalam Pengadaan sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

- a. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan
- b. berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan.

Bagian Keenam

Penyedia

Pasal 14

Penyedia di Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;

b. memiliki ...

- b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
- c. memiliki kemampuan untuk menyediakan Barang/jasa yang dibutuhkan; dan
- d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI PERENCANAAN PENGADAAN

Pasal 15

- (1) Perencanaan Pengadaan dilakukan pada saat penyusunan RKP Desa.
- (2) Perencanaan Pengadaan sesuai dengan RKP Desa meliputi:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. lokasi;
 - c. volume;
 - d. biaya;
 - e. sasaran;
 - f. waktu pelaksanaan kegiatan;
 - g. pelaksana kegiatan anggaran;
 - h. tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - i. rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan.
- (3) Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara hasil Musrenbangdes Pada saat penyusunan RKP Desa.
- (4) Perencanaan Pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa dan Rencana Kerja Kegiatan Desa.

Pasal 16

- (1) Hasil perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa diumumkan oleh Kepala Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.
- (2) Pengumuman perencanaan Pengadaan paling sedikit memuat:
 - a. Nama Kegiatan;
 - b. Nilai Pengadaan;

c. Jenis ...

- c. Jenis Pengadaan;
- d. Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);
- e. Nama TPK;
- f. Lokasi; dan
- g. Waktu Pelaksanaan.

BAB VII
PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Persiapan pengadaan secara Swakelola

Pasal 17

- (1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan secara Swakelola berdasarkan DPA yang terdiri dari:
 - a. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
 - c. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
 - e. RAB Pengadaan.
- (2) RAB Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Swakelola
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan Pengadaan melalui Swakelola berupa:
 - a. gambar rencana kerja;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuan; dan
 - e. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.
- (4) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan RAB Pengadaan yang dihitung dengan menggunakan harga pasar.
- (5) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memprioritaskan harga pasar di Desa setempat.
- (6) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, apabila Barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.

(7) Dalam ...

- (7) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
- (9) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan melalui Swakelola.

Bagian Kedua

Persiapan Pengadaan melalui Penyedia

Pasal 18

- (1) Kasi/ Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan secara Swakelola berdasarkan DPA yang terdiri dari:
 - a. waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - c. Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);
 - d. Harga Perkiraan Sendiri; dan
 - e. rancangan Surat Perjanjian.
- (2) HPS HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui Penyedia dengan merujuk pada harga pasar.
- (3) Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga Barang/jasa di Desa setempat dan/atau desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia.
- (4) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, apabila Barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.
- (5) Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - a. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar adalah harga yang ditawarkan Penyedia tersebut; dan
 - b. dalam ...

- b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar adalah:
 1. harga yang paling banyak ditemukan; atau
 2. harga yang paling rendah jika tidak ada harga sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- (6) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung dengan cara:
 - a. menggunakan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - c. memperhitungkan biaya angkut (jika Barang yang diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut).
- (7) Dalam Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
- (9) Rancangan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan apabila bukti transaksi Pengadaan tidak cukup/tidak dapat menggunakan bukti transaksi struk, nota dan kuitansi.
- (10) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Pengadaan Melalui Swakelola

Pasal 19

- (1) Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. TPK; atau
 - b. TPK dengan melibatkan masyarakat.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan panduan antara lain sebagai berikut:
 - a. TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan;
 - b. apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/ tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Narasumber dapat berasal dari masyarakat Desa setempat, organisasi perangkat Daerah, dan/atau tenaga profesional; dan/atau
 2. Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat Desa setempat.
 - c. TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi kegiatan; dan
 - d. dalam melaksanakan kegiatan Swakelola, TPK memanfaatkan sarana/prasarana/peralatan/ material/bahan yang tercatat/dikuasai Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan Swakelola, TPK memanfaatkan sarana/prasarana/peralatan/material/ bahan yang tercatat/dikuasai Desa. Dalam hal pelaksanaan Swakelola membutuhkan sarana prasarana/peralatan/material/ bahan yang tidak dimiliki/dikuasai Desa maka KAK TPK melaksanakan PBJ melalui Penyedia.
- (5) Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan Swakelola meliputi:
 - a. kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - b. penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.
- (6) Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan evaluasi Swakelola.
- (7) Apabila dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
- (8) Hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Swakelola diumumkan melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa
- (9) Untuk Pekerjaan Konstruksi selain diumumkan pada papan pengumuman Desa, pengumuman hasil pengadaannya dilakukan di lokasi pekerjaan.
- (10) Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan secara Swakelola meliputi:

a. Nama ...

- a. Nama Kegiatan;
- b. Nilai Pengadaan;
- c. Keluaran/ *Output* (terdiri dari volume dan satuan);
- d. Nama TPK;
- e. Lokasi; dan
- f. Waktu Pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

Bagian Kesatu
Pengadaan Melalui Swakelola

Pasal 20

- (1) Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara:
 - a. Pembelian Langsung;
 - b. Permintaan Penawaran; dan
 - c. Lelang.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan:
 - a. berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1).
 - b. untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan Barang/jasa secara langsung di Desa.
 - c. mengutamakan Penyedia dari Desa setempat dengan mempertimbangkan prinsip Pengadaan.
- (3) Dalam hal Pengadaan melalui Penyedia dengan cara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, TPK menyusun dokumen Lelang.
- (4) Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan antara lain:
 - a. ruang lingkup pekerjaan dalam bentuk KAK;
 - b. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - e. waktu pelaksanaan pekerjaan);
 - f. persyaratan administrasi;
 - g. rancangan Surat Perjanjian; dan
 - h. nilai total HPS.

(5) Persyaratan ...

- (5) Persyaratan administrasi untuk Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g berupa surat pernyataan kebenaran usaha.
- (6) Khusus untuk Pengadaan seperti kendaraan bermotor, genset, traktor dan Pengadaan dengan metode Lelang, persyaratan administrasinya berupa izin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Paragraf 1

Pembelian Langsung

Pasal 21

- (1) Pembelian Langsung dilaksanakan untuk Pengadaan sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pembelian Langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kasi/Kaur/TPK membeli Barang/jasa kepada satu Penyedia;
 - b. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
 - c. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung dapat dilakukan kepada Penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut.
- (4) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, Kasi/Kaur/TPK melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia lain di Desa setempat atau sekitar.
- (5) Apabila tidak terdapat Penyedia lain yang mampu menyediakan Barang/jasa maka Kasi/Kaur/TPK dapat melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia yang sama.

Paragraf 2

Permintaan Penawaran

Pasal 22

- (1) Permintaan Penawaran dilaksanakan untuk Pengadaan diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Permintaan ...

- (2) Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia;
 - b. dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut; dan
 - c. permintaan penawaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri persyaratan teknis berupa:
 1. Kerangka Acuan Kerja;
 2. rincian Barang/jasa;
 3. volume;
 4. spesifikasi teknis;
 5. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 6. waktu pelaksanaan pekerjaan); dan
 7. formulir surat pernyataan kebenaran usaha.
 - d. Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam dokumen lelang pada Pasal 20 ayat (4) dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;
 - e. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;
 - f. Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;
 - g. dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;
 - h. dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
 - i. dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
 - j. hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi;
 - k. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau Surat Perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia; dan
 - l. dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.

Paragraf 3

Lelang

Pasal 23

- (1) Lelang dilaksanakan untuk Pengadaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pengumuman Lelang;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang;
 - b. pemasukan Dokumen Penawaran;
 - c. evaluasi penawaran;
 - d. Negosiasi; dan
 - e. penetapan pemenang.
- (3) Mekanisme pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta Penyedia menyampaikan penawaran tertulis.
 - b. pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya dipapan pengumuman desa. Pengumuman Pengadaan sekurang-kurangnya berisi:
 1. Nama paket pekerjaan;
 2. nama TPK;
 3. lokasi pekerjaan;
 4. ruang lingkup pekerjaan;
 5. nilai total HPS;
 6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
 7. jadwal proses Lelang.
 - c. bersamaan dengan pengumuman Pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada Penyedia untuk mengikuti Lelang.
- (4) Mekanisme pendaftarandan pengambilan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti Lelang; dan
 - b. TPK memberikan dokumen Lelang kepada Penyedia yang mendaftar.

(5) Pendaftaran ...

- (5) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan Penyedia dengan menyampaikan penawaran tertulis yang berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga kepada TPK.
- (6) Evaluasi Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan evaluasi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga.
- (7) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - a. apabila terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi; atau
 - b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia yang lulus menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.
- (5) Penetapan Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh TPK kepada Penyedia yang memiliki harga penawaran terendah.
- (6) Transaksi dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia.

Paragraf 4
Pengendalian

Pasal 24

- (1) Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam bukti transaksi.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan dengan bukti transaksi maka Kasi/Kaur memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka Kasi/Kaur dapat memberi sanksi kepada Penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Bukti Transaksi

Pasal 25

- (1) Bukti transaksi Pengadaan terdiri atas:
 - a. bukti pembelian; dan
 - b. Surat Perjanjian.
- (3) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa setruk, nota dan kuitansi.
- (4) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung atau Permintaan Penawaran.

Bagian Keempat
Perubahan Surat Perjanjian

Pasal 26

- (1) Perubahan Surat Perjanjian dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi keadaan kahar; atau
 - b. terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasi/Kaur Bersama Penyedia melakukan perubahan Surat Perjanjian yang meliputi perubahan:
 - a. spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
 - b. volume; dan/atau
 - c. jadwal pelaksanaan.
- (3) Dalam hal perubahan Surat Perjanjian memerlukan perubahan anggaran, Kasi/Kaur dapat melakukan perubahan Surat Perjanjian setelah dilakukan penyesuaian dokumen anggaran.
- (4) Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa.

(5) Perubahan ...

- (5) Perubahan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Kasi/Kaur dengan persetujuan oleh Kepala Desa.

Bagian Kelima

Pengumuman

Pasal 27

- (1) TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.
- (2) Pengumuman kepadavmasyarakat, hasil Pengadaan melalui Penyedia dengan metode Permintaan Penawaran dan Lelang meliputi:
 - a. Nama Kegiatan;
 - b. Nama Penyedia;
 - c. Nilai Pengadaan;
 - d. Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);
 - b. Lokasi; dan
 - c. Waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

BAB IX

PEMBAYARAN PRESTASI KERJA

Pasal 28

- (1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjanjian.
- (2) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara serah Terima Barang/Jasa.

BAB X

KEADAAN KAHAR

Pasal 29

- (1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.

(2) Keadaan ...

- (2) Keadaan kahar dalam Surat Perjanjian PBJ di Desa meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana sosial; dan/atau
 - c. kebakaran.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan asli pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hal-hal merugikan dalam PBJ yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak penyedia Barang tidak termasuk kategori keadaan kahar.
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (6) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan embali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja.

BAB XI

PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

Pasal 30

- (1) Kasi/Kaur secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja apabila:
 - a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa lebih dari 30 hari kalender; dan
 - b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Kasi/Kaur.
- (2) Apabila Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

BAB XII

SANKSI

Pasal 31

- (1) Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi Kasi/Kaur, TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan PBJ, sehingga mengurangi/menghambat, memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan PBJ;
 - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kasi/Kaur; dan/atau
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;
 - b. gugatan secara perdata; dan/atau
 - c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.
- (5) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses PBJ, maka Kasi/Kaur/TPK dikenakan:
 - a. sanksi administrasi;

b. tuntutan ...

- b. tuntutan ganti rugi; dan/atau
 - c. sanksi pidana.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa teguran/peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh Kasi/Kaur/TPK dalam proses PBJ di Desa, maka dapat diberhentikan sebagai Kasi/Kaur/TPK.
- (7) Tuntutan ganti rugi dan sanksi pidana kepada Kasi/Kaur/TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Pengadaan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

Pasal 33

- (1) TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:
- a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan
 - b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukungnya.

(3) Berdasarkan ...

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan:
 - a. melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima; atau
 - b. melalui Penyedia dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- (4) Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
- (5) Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait Pengadaan yang telah dilaksanakan.
- (6) Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 34

- (1) Pembinaan Pengadaan dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di kabupaten setempat.
- (3) Apabila diperlukan organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat berkonsultasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Pengawasan pengelolaan Pengadaan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 36 ...

Pasal 36

Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Pengadaan sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Desa.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; dan
 - b. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal

BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENGADAAAN BARANG/
JASA DI DESA

PEDOMAN PENGADAAAN BARANG/JASA DI DESA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Desa, dengan demikian perlu keselarasan antara tata kelola keuangan desa dengan tata kelola Pengadaan Barang/jasa yang dibiayai dengan APB Desa agar dapat mendukung tercapainya hasil pengadaan yang sesuai dengan prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, dan akuntabel seta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Selain itu, tata kelola pengadaan juga harus selaras dengan tata kelola pemerintahan desa, sehingga hasilnya dapat mendukung pembangunan Desa dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya pedoman tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagai acuan bagi Desa tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.

B. Maksud Dan Tujuan

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan menggunakan APBDes. Dengan tujuan agar pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di Desa

II. PARA PIHAK DALAM PENGADAAAN

A. Kepala Desa

Tugas Kepala Desa dalam pengadaan adalah:

1. Menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
2. Mengumumkan Rencana Kerja Kegiatan Desa sebelum dimulainya proses pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan

3. Menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

B. Kepala Seksi/Kepala Urusan

1. Kasi/Kaur mengelola pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya
2. Tugas Kasi/ Kaur dalam mengelola pengadaan :
 - a. Mengecek Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - b. Menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
 - c. Menyampaikan dokumen pengajuan penarikan anggaran untuk kegiatan Pengadaan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa dalam DPA;
 - d. Melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan Musrenbangdes;
 - e. Menandatangani bukti transaksi pengadaan;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
 - g. Menerima hasil Pengadaan;
 - h. Melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
 - i. Menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
3. Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
4. Kaur Keuangan dikecualikan dari pengelolaan Pengadaan sebagaimana dimaksud angka 1.

C. Tim Pelaksana Kegiatan

1. TPK terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Masyarakat.
2. Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c harus ada dalam TPK.
3. Perangkat Desa yang dimaksud adalah Kepala Dusun.
4. TPK ditetapkan berjumlah asal paling sedikit 3 (tiga) orang paling banyak 5 (Lima) orang.
5. Organisasi TPK terdiri atas:
 - a. Ketua;

- b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
6. Tugas TPK dalam Pengadaan adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Swakelola;
 - b. Mengawasi Swakelola;
 - c. Mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan oleh Penyedia;
 - d. Memilih dan menetapkan Penyedia ;
 - e. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia ;
 - f. Memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
 - g. Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan melalui Penyedia.
 7. Khusus untuk pekerjaan kontruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggungjawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami kegiatan/pekerjaan kontruksi.
 8. TPK diberikan honorarium paling banyak sebesar 3 % (tiga per seratus) dari nilai pagu kegiatan.
 9. Kasi/Kaur dalam mengelola kegiatan dapat diberikan biaya administrasi kegiatan dengan maksimal sebesar 2% (dua perseratus) dari pagu kegiatan antara lain untuk belanja ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum rapat dan perjalanan dinas.
 10. Kegiatan yang dapat diberikan biaya administrasi adalah Belanja modal bangunan Gedung dan taman, Belanja modal jalan/prasarana jalan, Belanja modal jembatan, Belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan dan Belanja modal jaringan/instalasi.
 11. Besaran honor TPK dan administrasi setiap kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

D. Masyarakat

1. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan
2. Berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan.

E. Penyedia

Penyedia diutamakan dari Desa dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki tempat/Lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
- b. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
- c. Memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan
- d. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

III. PERENCANAAN PENGADAAN

1. Perencanaan Pengadaan dilakukan pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
2. Perencanaan Pengadaan yang dimuat dalam RKP Desa meliputi:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. lokasi;
 - c. volume;
 - d. biaya;
 - e. sasaran;
 - f. waktu pelaksanaan kegiatan;
 - g. pelaksana kegiatan anggaran;
 - h. tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - i. rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan.
3. Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musrenbangdes dalam penyusunan RKP Desa.
4. Pengumuman

Hasil perencanaan pengadaan yang ada di dalam RKP Desa diumumkan oleh Kepala Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang - kurangnya pada papan pengumuman Desa. Pengumuman perencanaan pengadaan paling sedikit memuat:

- a. Nama Kegiatan;
- b. Nilai Pengadaan;
- c. Jenis Pengadaan;
- d. Keluaran/*Output* (terdiri dari volume dan satuan);
- e. Nama TPK;
- f. Lokasi; dan
- g. Waktu Pelaksanaan.

IV. PERSIAPAN PENGADAAN

A. Umum

1. Setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa Perencanaan Pengadaan menjadi acuan Kasi/Kaur selaku Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. Kasi/Kaur melakukan pengecekan DPA dan perubahannya untuk memastikan rencana Pengadaan telah sesuai dengan kegiatan, anggaran, lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan.
3. Dalam hal dijumpai ketidaksesuaian RAB dengan harga pasar menjelang Pengadaan:
 - a. Kasi/Kaur melakukan revisi RAB; atau
 - b. Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa bila diperlukan pergeseran rincian objek belanja.
 - c. Kepala Desa menindaklanjuti laporan kasi/kaur dengan melakukan perubahan penjabaran APBDDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
4. Dalam hal diperlukan perubahan volume pada rincian barang/jasa dalam RAB, perubahan tersebut dimungkinkan sepanjang tidak mengakibatkan kenaikan nilai pagu rincian objek belanja.
5. Dalam hal dijumpai ketidaksesuaian lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, dan/atau tim pelaksana kegiatan dengan kondisi menjelang pengadaan, Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
6. Kepala Desa menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan musyawarah desa untuk menyepakati perubahan lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, dan/atau tim pelaksana kegiatan.
 - b. Hasil musyawarah desa dituangkan dalam berita acara musyawarah dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
 - c. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi dasar kasi/kaur melakukan perubahan rencana kerja dalam dokumen DPA.

7. Dalam hal lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, dan/atau tim pelaksana kegiatan sudah sesuai dengan kondisi menjelang pengadaan, Kasi/Kaur menyusun dan melengkapi dokumen persiapan pengadaan baik Pengadaan yang dilakukan melalui Swakelola maupun melalui Penyedia.

B. Persiapan Pengadaan Melalui Swakelola

1. Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan secara Swakelola berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri dari:
 - a. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
 - c. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
 - e. RAB Pengadaan yaitu RAB yang disusun oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Swakelola.
2. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan Pengadaan melalui Swakelola berupa:
 - a. gambar rencana kerja;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuan; dan
 - e. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.
3. Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan RAB Pengadaan yang dihitung dengan menggunakan data/informasi antara lain:
 - a. Harga pasar di Desa setempat; atau
 - b. Harga di desa terdekat dari desa setempat.
4. Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
5. Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
6. Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan melalui Swakelola.

B. Persiapan Pengadaan melalui Penyedia

1. Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui Penyedia berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas:
 - a. waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);
 - d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - e. rancangan surat perjanjian.
2. HPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d adalah harga perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui Penyedia dengan merujuk pada harga pasar. Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga barang/jasa di Desa setempat dan/atau desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia.
3. Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di desa sekitar, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.
4. Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - a. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar adalah harga yang ditawarkan Penyedia tersebut.
 - b. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar adalah :
 - 1) harga yang paling banyak ditemukan; atau
 - 2) harga yang paling rendah, jika tidak ada harga sebagaimana dimaksud pada angka 1).
5. Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung dengan cara:
 - a. Menggunakan data/informasi antara lain:
 - 1) Harga pasar di Desa setempat; atau
 - 2) Harga di desa terdekat dari desa setempat, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.
 - b. Memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - c. Memperhitungkan biaya angkut (jika barang yang diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut).

6. Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
7. Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
8. Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e digunakan untuk transaksi yang membutuhkan penjabaran teknis terkait ruang lingkup kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain.
9. Dalam hal pelaksanaan Pengadaan dilakukan oleh TPK, Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan.

IV. PELAKSANAAN PENGADAAN

A. Pengadaan Melalui Swakelola

1. Ketentuan Umum

Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada tahap Persiapan Pengadaan Bab III.

2. Pelaksanaan

a. Swakelola dilaksanakan oleh :

1. Kaur/Kasi; atau
2. TPK; atau
3. TPK dan masyarakat.

b. Dalam hal Swakelola dilaksanakan oleh TPK dan masyarakat, TPK mengutamakan tenaga kerja dari Desa setempat yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan Swakelola.

c. Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b diusulkan oleh TPK untuk mendapat persetujuan dari Kasi/Kaur.

d. Pelaksanaan Swakelola dapat dibantu oleh narasumber / tenaga ahli.

e. Narasumber/tenaga ahli sebagaimana pada huruf d dapat berasal dari warga masyarakat Desa, organisasi perangkat daerah kabupaten/ kota, dan/ atau tenaga profesional.

3. Pengumuman

- a. Hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Swakelola diumumkan melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan Pengumuman Desa.
- b. Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan secara Swakelola meliputi
 - 1) Nama kegiatan
 - 2) Nilai pengadaan ;
 - 3) Keluaran / Output (terdiri dari volume dan satuan);
 - 4) Nama TPK;
 - 5) Lokasi; dan
 - 6) Waktu pelaksanaan.

B. Pengadaan Melalui Penyedia

1. Ketentuan Umum

Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan:

- a. Berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/ Kaur sebagaimana dimaksud pada Tahap Persiapan Pengadaan Bab III.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.
Contoh kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola antara lain:
 - 1) Pembelian material pada Swakelola pembangunan jembatan Desa;
 - 2) Sewa peralatan (excavator) untuk Swakelola pembangunan jalan kantong produksi; dan
 - 3) Konsultan untuk merencanakan pembangunan jaringan air bersih (artesis).

Contoh kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa antara lain:

- 1) Pembelian komputer, printer, dan kertas;
 - 2) Langganan internet; dan
 - 3) Pembelian kendaraan bermotor.
- c. mengutamakan penyedia dari Desa setempat.
 - d. Dalam hal pemilihan Penyedia dengan cara Lelang, TPK menyusun dokumen Lelang.
 - e. Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud huruf d mencantumkan antara lain :

- 1) ruang lingkup pekerjaan (dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK));
 - 2) rincian barang/jasa;
 - 3) volume;
 - 4) spesifikasi teknis;
 - 5) gambar rencana kerja (apabila diperlukan); dan/atau;
 - 6) waktu pelaksanaan pekerjaan), disertai persyaratan administrasi (sebagai contoh surat pernyataan kebenaran usaha, izin usaha (bila diperlukan), NPWP, rancangan surat perjanjian dan nilai total RAB;
- f. Dalam hal pengadaan barang/jasa dilaksanakan seluruhnya dilaksanakan oleh penyedia, sedapat mungkin menggunakan sumber daya yang ada di desa setempat.

2. Pelaksanaan

a. Pengadaan melalui penyedia dilakukan dengan cara:

1) Pembelian Langsung

- a) Kaur/kasi/TPK membeli barang/jasa kepada satu penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Kaur/kasi/TPK menentukan Penyedia;
 - ii. Kaur/kasi/TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
 - iii. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- b) Kasi/Kaur melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan Musrenbangdes menggunakan tata cara Pembelian Langsung.

2) Permintaan Penawaran

TPK membeli barang/ jasa kepada Penyedia dengan cara meminta penawaran secara tertulis minimal 2 (dua) Penyedia, yang tata caranya sebagai berikut:

- a) TPK meminta penawaran secara tertulis minimal kepada 2 (dua) Penyedia. Permintaan penawaran dilampiri persyaratan teknis (Kerangka Acuan Kerja (KAK), rincian barang / jasa, volume, spesifikasi teknis, gambar rencana kerja (apabila diperlukan), dan / atau waktu pelaksanaan pekerjaan) dan formulir surat pernyataan kebenaran usaha;
- b) Penyedia menyampaikan penawaran tertulis berisi penawaran teknis dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;

- c) TPK mengevaluasi penawaran penyedia;
 - d) Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;
 - e) Dalam hal Penyedia yang lulus persyaratan teknis dan harga berjumlah lebih dari 1 (satu), maka TPK menetapkan dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - f) Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
 - g) Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus persyaratan teknis dan harga, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
 - h) Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi; dan
 - i) Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian dan surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia.
- 3) Lelang
- TPK melakukan Lelang dengan tata cara sebagai berikut:
- a) Lelang diikuti oleh minimal 2 (dua) Penyedia
 - b) TPK mengumumkan Pengadaan untuk mengundang dan meminta Penyedia menyampaikan penawaran tertulis.
 - c) Pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sekurang-kurangnya di papan Pengumuman Desa;
 - d) Selain bersamaan dengan pelaksanaan Pengumuman Pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada Penyedia untuk mengikuti Lelang.
 - e) Pengumuman Pengadaan sekurang-kurangnya berisi:
 - (1) Nama pekerjaan;
 - (2) Nama TPK;
 - (3) Lokasi pekerjaan;
 - (4) Ruang lingkup pekerjaan;
 - (5) Nilai total RAB;
 - (6) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
 - (7) Jadwal proses Lelang.

- f) TPK memberikan dokumen Lelang kepada penyedia yang mendaftar;
 - g) Penyedia menyampaikan penawaran tertulis berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga.
 - h) TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;
 - i) Hasil Evaluasi penawaran disampaikan kepada Penyedia;
 - j) Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan harga;
 - k) TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;
 - l) Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia yang lulus menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi;
 - m) Dalam hal terdapat 1 (satu) Penyedia yang lulus maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi; dan
 - n) Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Kasi/ Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia.
- b. Jenjang nilai Pengadaan melalui Penyedia sebagai berikut :
- 1) Pemberlian langsung
Dilaksanakan untuk pengadaan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
 - 2) Permintaan Penawaran
Dilaksanakan untuk Pengadaan diatas Rp. 50.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - 3) Lelang
Dilaksanakan untuk Pengadaan di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- c. Dalam pengadaan barang/jasa tidak boleh dilakukan pemilahan jenis barang/jasa yang dapat disediakan oleh 1 (satu) penyedia dalam satu kegiatan dengan maksud menghindari jenjang nilai pengadaan.
3. Bukti Transaksi
- a. Bukti transaksi Pengadaan terdiri atas :
 - 1) Bukti pembelian; dan
 - 2) Surat perjanjian
 - b. Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) digunakan untuk Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung.

4. Perubahan Surat Perjanjian

- a. Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian, Kasi/Kaur atas pemberitahuan Penyedia dapat melakukan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan / atau menghentikan perjanjian.
- b. Kasi/Kaur melaporkan kepada Kepala Desa bilamana ada perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/ atau penghentian kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam addendum surat perjanjian.

C. Pengumuman

1. TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyedia di media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat, sekurang – kurangnya pada papan Pengumuman Desa.
2. Pengumuman kepada masyarakat, hasil Pengadaan melalui Penyedia dengan metode Permintaan Penawaran dan Lelang meliputi:
 - a. Nama Kegiatan;
 - b. Nama Penyedia;
 - c. Nilai Pengadaan;
 - d. Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);
 - e. Lokasi; dan
 - f. Waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

V. PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

1. TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur :
 - a. Kemajuan pelaksanaan Pengadaan;
 - b. Pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100 % (seratus persen).
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan dokumen pendukungnya.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, Kasi/ Kaur menerima hasil kegiatan dari Pengadaan:
 - a. Melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) ; atau
 - b. Melalui penyedia dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - c. Khusus kegiatan konstruksi wajib dilengkapi dengan dokumen pemeriksa hasil perkembangan pekerjaan kondisi fisik 50% (lima puluh persen) kondisi fisik 100% (seratus persen) yang dilakukan oleh TPK.
4. Kasi/ Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan dan melakukan pengarsipan dokumen terkait pengadaan yang telah dilaksanakan.
5. Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.

DAFTAR FORMAT DOKUMEN SURAT PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

NO	CONTOH FORMAT	ROMAWI
1.	Pakta Integritas Kasi/Kaur dan Anggota TPK	I
2.	Surat Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan	II
3.	Format Surat Keputusan Kepala Desa Biaya Administrasi	IV
4.	Contioh Format Kerangka Acuan Kerja	V
5.	Contoh RAB Pengadaan Kaur/Kasi (Penyedia Pendukung Swakelola.	VI
6.	Contoh RAB berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Metode	VII
7.	Surat Permintaan Penawaran	VIII
8.	Contoh Format Surat Penawaran Harga	IX
9.	Pengumuman Lelang	X
10.	Contoh Format Evaluasi Penawaran	XI
11.	Contoh Format Undangan Negosiasi Harga	XII
12.	Contoh Format Berita Acara Hasil Negosiasi	XIII
13.	Contoh Format surat pemberitahuan Hasil Penawaran	XIV
14.	Contoh format Berita Acara Penetapan Pemenang	XV
15.	Contoh Format Surat Perjanjian Kerja	XVI
16.	Contoh Format Penyerahan Hasil Pekerjaan	XVII
17.	Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Khusus Konstruksi)	XVIII

18.	Contoh Format Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Khusus Konstruksi)	XIX
19.	Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Khusus Non Konstruksi)	XX
20.	Contoh Format Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Khusus Non Konstruksi)	XXI
21.	Contoh Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan	XXII
22.	Contoh Berita Acara Serah Terima Pekerjaan	XXIII
23.	Contoh Format Berita Acara Musyawarah Desa Pembangunan Desa	XXIV
24.	Contoh Format Pengumuman Hasil Pengadaan	XXV
25.	Contoh Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan	XXVI

I. Pakta Format Integritas Kaur/Kasi dan Anggota TPK

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan : Kasi/Kaur
.....

Bertindak untuk dan atas nama Pribadi.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa), dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan Melaksanakan Kegiatan dengan Cermat, Efektif dan Evisien serta akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan transparan dan akuntabel.
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)

Yang Membuat Pernyataan:
Kasi/Kaur,

Materai Rp.6000,-+Cap

(..... Nama)

Catatan :

- Setiap Kasi/Kaur Menandatangani Pakta Integritas
- Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan pada saat SK. Penetapan Sebagai PPKD.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan : Ketua/Sekretaris/Anggota TPK Pada Kegiatan
.....

Bertindak untuk dan atas nama Pribadi.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa), dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan Melaksanakan Kegiatan dengan Cermat, Efektif dan Evisien serta akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan transparan dan akuntabel.
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)

Yang Membuat Pernyataan:
Ketua/Sekretaris/Anggota TPK Pada
Kegiatan.....,

Materai Rp.6000,-+Cap

(..... Nama)

Catatan :

- Setiap Anggota TPK Menandatangani Pakta Integritas
- Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan pada saat SK. Pengangkatan sebagai Tim Pelaksanaan Kegiatan diterima.

II. Format SK Kades tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan



KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR:..... TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA (TPK) PADA KEGIATAN DESA
..... KECAMATAN..... KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN
.....

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (9) Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengadaan Barang di Desa, Kepala Desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ... tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Kegiatan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 - 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 - 5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Nomor.....);

6. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran..... (Lembaran Desa Tahun Nomor.....);
7. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran (Berita Desa Tahun..... Nomor.....).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Kegiatan..... Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Kutai Timur dengan susunan keanggotaan TPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan tugas diberikan honor dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal,

KEPALA DESA,

(.....**Nama**.....)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :
TANGGAL :

**TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PADA KEGIATAN..... DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN**

HONOR KEGIATAN
.....% (Maksimal 3%)* X Rp. (Pagu Kegiatan) = Rp (dalam
huruf

DENGAN RINCIAN :

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1.	Ketua / Anggota	Rp.
2.	Sekretaris / Anggota	Rp.
3.	Anggota	Rp.
4.	Anggota	Rp.
5.	Anggota	Rp.

KEPALA DESA.....,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

III. Format Surat Keputusan Kepala Desa Biaya Administrasi Kegiatan



KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR:..... TAHUN

TENTANG

BIAYA ADMINISTRASI KEGIATAN DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN

KEPALA DESA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengadaan Barang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ... tentang Biaya Administrasi Kegiatan Desa Kecamatan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kutai Timur (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 Nomor 2431);
9. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa i (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Nomor.....);
10. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran..... (Lembaran Desa Tahun Nomor.....);
11. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran (Berita Desa Tahun..... Nomor.....).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Biaya Administrasi Kegiatan Desa Kecamatan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Biaya Administrasi Kegiatan sebagai mana dimaksud dalam Dikem KESATU ditentukan sebesar ... Persen (*maksimal 3%*)* dikalikan nilai Pagu kegiatan Rp.
- KETIGA** : Biaya administrasi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Dikem KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal,
KEPALA DESA,

(.....**Nama**.....)

Lampiran : Keputusan Kepala Desa...
Nomor :.....
Tanggal :

BIAYA ADMINISTRASI KEGIATAN
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN

ADMINISTRASI KEGIATAN

.....% (Maksimal 2%)* X Rp. (Pagu Kegiatan) = Rp (dalam huruf)

Dengan Rincian Penggunaan Sebagai Berikut :

NO	RINCIAN	BESARAN (Rp)
1.	ATK, dan Benda Pos - Kertas - Sipidol - Map - Tinta Printer - Materai - Dll.....	Rp..... Rp..... Rp..... Rp..... Rp.....
2	Cetak dan Penggandaan - Foto Copy - Jilid -	Rp..... Rp.....
3.	Makan dan Minum Rapat - Makan - Minum	Rp..... Rp.....
4.	Perjalanan Dinas - Kaur/Kasi/TPK - Tenaga Teknik/Kader Teknik	Rp..... Rp.....
Jumlah Total Administrasi Kegiatan		Rp.....

KEPALA DESA.....,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

IV. Contoh Format Kerangka Acuan Kerja



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGGUNA ANGGARAN :(KADES)
DESA : PEMERINTAH DESA.....
BIDANG :
SUB BIDANG :
KEGIATAN :
PEKERJAAN :
SUMBER DANA :

TAHUN ANGGARAN 202...
KERANGKA ACUAN KERJA

I. Latar Belakang

Gambaran umum singkat tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan, permasalahan terkait dengan kebutuhan barang yang akan diadakan

II. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud pekerjaan/ pengadaan barang

b. Tujuan

Tujuan pekerjaan/pengadaan barang.....

III. Target/Sasaran

Target/ sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan barang yaitu.....

IV. Nama Organisasi

- K/L/DI : Pemerintah Desa.....
- Nama PA :(Kades)
- Nama PAK :(Kaur/Kasi)

V. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana pekerjaan ini adalah DD/ADD/DBH sebagaimana telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020.

Besaran biaya yang diperlukan untuk pekerjaan ini adalah sebesar **Rpxxx.000.000,00 (xxx Juta Rupiah)**.

VI. Ruang Lingkup Pekerjaan

Adapun ruang lingkup pekerjaannya meliputi:

1. **Pekerjaan Persiapan**, meliputi pekerjaan
2. **Pekerjaan**, meliputi
3. **Dst**

(sesuai kebutuhan)

VII. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah.....

VIII. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang (kapan barang yang dimaksud harus sudah ada dilokasi /diserahterimakan) :.....hari/ bulan, terhitung sejak (*SPMK/Nota Pesanan*)

IX. Tenaga Ahli/Terampil

Tenaga ahli/terampil yang diperlukan untuk pemasangan/ penggunaan/pengoperasian barang yang diadakan (*apabila diperlukan*)

X. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi meliputi :

- Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;
- Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ;
- Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
- Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- Ketentuan gambar kerja;
- Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
- Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
- Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan kesehatan kerja)
- Dll yang diperlukan

XI. Penutup

Hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat teknis konstruksi dan bahan bangunan yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).

Mengetahui
Kepala Desa....

Anggaran
Desa.....

PPelaksana

(.....)

(.....)

V. Contoh RAB Pengadaan Kaur/Kasi (Penyedia Pendukung Swakelola)

CONTOH RAB PENGADAAN MATERIAL LOKAL OLEH SATU PENYEDIA

Desa :..... Bidang :.....
 Kecamatan :..... Kegiatan :.....
 Kabupaten :..... Lokasi :.....
 Provinsi :.....

No	Uraian	Spesifikasi Teknis	Volume	Sat.	Harga Sat. (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jadwal Pengadaan
1	Balok 4/6 -4 m (Kls II)	Mutu Kayu Kls II	1	M3			Minggu Ke II Bulan Juli
2	Balok 4/6 -4 m (Kls II)	Mutu Kayu Kls II	1	M3			Minggu Ke II Bulan Juli
3	Balok 4/6 -4 m (Kls II)	Mutu Kayu Kls II	1	M3			Minggu Ke II Bulan Juli
4	Dst.....						

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

.....Tanggal.....
Kasi/Kaur

(.....)

CONTOH RAB PENGADAAN MATERIAL LOKAL OLEH SATU PENYEDIA

Desa :..... Bidang :.....
 Kecamatan :..... Kegiatan :.....
 Kabupaten :..... Lokasi :.....
 Provinsi :.....

No	Uraian	Spesifikasi Teknis	Volume	Sat.	Harga Sat. (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jadwal Pengadaan
1	Batu Gunung / Kali		1	M3			Minggu Ke II Bulan Juli
2	Pasir Pasangan / Betonan / Beton		1	M3			Minggu Ke II Bulan Juli
3	Pasir urug		1	M3			Minggu Ke II Bulan Juli
4	Sirtu		1	M3			Minggu Ke II Bulan Juli
5	Dst....						

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

.....Tanggal.....
Kasi/Kaur

(.....)

CONTOH RAB PENGADAAN MATERIAL TOKO OLEH SATU PENYEDIA

Desa : Bidang :
 Kecamatan : Kegiatan :
 Kabupaten : Lokasi :
 Provinsi :

No	Uraian	Spesifikasi Teknis	Volume	Sat.	Harga Sat. (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jadwal Pengadaan
1	Semen 50 Kg		1	Sak			Minggu Ke II Bulan Juli
2	Besi Beton Dia 12 mm		1	Btg			Minggu Ke II Bulan Juli
3	Atap Seng Gelombang		1	Lmbr			Minggu Ke II Bulan Juli
4	Keramik 40 cm x 40 cm		1	Dos			Minggu Ke II Bulan Juli
5	Dst....						

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

.....Tanggal.....
Kasi/Kaur

(.....)

CONTOH RAB PENGADAAN SEWA ALAT OLEH SATU PENYEDIA

Desa : Bidang :
 Kecamatan : Kegiatan :
 Kabupaten : Lokasi :
 Provinsi :

No	Uraian	Spesifikasi Teknis	Volume	Sat.	Harga Sat. (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jadwal Pengadaan
1	Mobilisasi/Demobilisasi		1	Unit			Minggu Ke II Bulan Juli
2	Excavator		1	Jam			Minggu Ke II Bulan Juli
3	Motor Greder		1	Jam			Minggu Ke II Bulan Juli
4	Vibrator Roller		1	Jam			Minggu Ke II Bulan Juli
5	Dst....						

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

.....Tanggal.....
Kasi/Kaur

(.....)

VI. Contoh RAB berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Metode Lelang

BIDANG :
 SUB.BIDANG :
 KEGIATAN :
 LOKASI :
 THN. ANGGARAN :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan 1. Pembersihan Lokasi 2. Pengukuran dan Pemasangan Bowplank 3. Pas.Papan Proyek 4. Dst.				
	Sub Jumlah				
II	Pekerjaan Tanah dan Pasir 1. Galian Tanah 2. Urugan Tanah 3. Dst...				
	Sub Jumlah				
III	Pekerjaan Pasangan, Dinding, Plesterandan Lantai 1. Pas.Batu Kosong 2. Pas. Batu 1:4				
	Sub Jumlah				
	Jumlah (I+II+III)				
	Real Cos				
	PPN 10%				
	Jumlah Total				
	Dibulatkan				
	Terbilang “				

Kasi/Kaur

(.....)

VII. Contoh Format Surat Permintaan Penawaran

KOP Pemerintah Desa

.....,

Nomor : Kepada
Lamp. : 1 (satu) Berkas Yth. (Penyedia Toko/UD /CV/PT)
Hal : **Permintaan Penawaran.** di -

.....

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan, dimana didalamnya terdapat pekerjaan

Adapun persyaratan teknis pengadaan mengacu pada :

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); Jika diperlukan*
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Jika diperlukan*
3. Rencana dan Jadwal Pengadaan; dan
4. gambar rencana kerja, apabila diperlukan*.

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud di atas *terlampir*.

Maka apabila saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut, diminta segera mengajukan surat penawaran harga.

Surat Penawaran dialamatkan kepada selaku Tim Pelaksana Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Penawaran dibuat rangkap 3 (tiga), asli 1 (satu) bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).
2. Surat Penawaran paling lambat kami terima tanggal

Surat Penawaran dilampiri :

1. Daftar penawaran harga sudah memperhitungkan pajak dan harga sampai di desa;
2. waktu pelaksanaan pekerjaan;
3. Surat pernyataan kebenaran usaha
4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Foto copy KTP Pemilik Usaha; dan
6. izin usaha (*bila diperlukan*)*.

Demikian surat permintaan penawaran ini kami sampaikan atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kasi/Kaur
Selaku PPKD

Ketua TPK
Desa

.....

.....

Lampiran : Surat TPK Desa

Nomor :

Tanggal :

CONTOH RENCANA DAN JADWAL PENGADAAN

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Bidang :

Kegiatan :

Lokasi :

No	URAIAN	Spesifikasi Teknis	Volume	Satuan	Jadwal Pengadaan
I	BAHAN LOKAL				
1	Balok 4/6 x 4 (Kls. II)			m3	Minggu ke II Bulan Juli
2	Balok 5/10 x 4 (Kls. II)			m3	Minggu ke II Bulan Juli
3	Balok 5/7 x 4 (Kls. II)			m3	Minggu ke II Bulan Juli
4	Balok 5/7 x 4 (Kls. III)			m3	Minggu ke II Bulan Juli
5	Dolken kayu Ø 8-10cm -panjang 4 m			m3	Minggu ke II Bulan Juli
6	Kerikil Sungai Pilihan/Koral Beton			m3	Minggu ke II Bulan Juli
7	Kayu Papan Kls III			m3	Minggu ke II Bulan Juli
8	Papan 3/20 x 4 (Kls. II)			m3	Minggu ke II Bulan Juli

Mengetahui :
Kasi/Kaur
Selaku PPKD

.....,Tanggal.....,.....

Ketua TPK

.....

CONTOH RENCANA DAN JADWAL PENGADAAN

Desa :.....
 Kecamatan :.....
 Kabupaten :.....
 Provinsi :.....

Bidang :.....
 Kegiatan :.....
 Lokasi :.....

URAIAN	Spesifikasi Teknis	Volume	Satuan	Jadwal Pengadaan
BAHAN TOKO				
Semen 50 Kg			m3	Minggu Ke II Bulan Juli
Besi Beton Dia 12 mm			m3	Minggu Ke II Bulan Juli
dst.....				

Mengetahui :
 Kasi/Kaur
 Selaku PPKD

.....,Tanggal.....,.....,

Ketua TPK

CONTOH RENCANA DAN JADWAL PENGADAAN

Desa :.....
 Kecamatan :.....
 Kabupaten :.....
 Provinsi :.....

Bidang :.....
 Kegiatan :.....
 Lokasi :.....

URAIAN	Spesifikasi Teknis	Volume	Satuan	Jadwal Pengadaan
SEWA ALAT				
Mobilisasi/Demobilisasi			Unit	Minggu Ke II Bulan Juli
Excavator			Jam	Minggu Ke II Bulan Juli
Motor Greder			Jam	Minggu Ke II Bulan Juli
dst				

Mengetahui :
 Kasi/Kaur
 Selaku PPKD

.....,Tanggal.....,.....,

Ketua TPK

CONTOH RENCANA DAN JADWAL PENGADAAN

Desa :.....
 Kecamatan :.....
 Kabupaten :.....
 Provinsi :.....

Bidang :.....
 Kegiatan :.....
 Lokasi :.....

	URAIAN	Spesifikasi Teknis	Volume	Satuan	Jadwal Pengadaan
1	BIBIT SAPI BALI			Ekor	Minggu Ke II Bulan Juli
2	BIBIT KAMBING			Ekor	Minggu Ke II Bulan Juli
3	dst			Minggu Ke II Bulan Juli

Mengetahui :
 Kasi/Kaur
 Selaku PPKD

.....,Tanggal.....,.....

Ketua TPK

.....

LAMPIRAN : SURAT (PT/CV/UD)
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH DAFTAR PENAWARAN HARGA OLEH PENYEDIA

Desa : Bidang :
Kecamatan : Kegiatan :
Kabupaten : Lokasi :
Provinsi :

No	Uraian	Spesifikasi Teknis	Volume	Sat.	Harga Sat. (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jadwal Pengadaan
1	Balok 4/6 -4 m (Kls II)	Mutu Kayu Kls II	1	M3			Minggu Ke II Bulan Juli
2	Balok 4/6 -4 m (Kls II)	Mutu Kayu Kls II	1	M3			Minggu Ke II Bulan Juli
3	Balok 4/6 -4 m (Kls II)	Mutu Kayu Kls II	1	M3			Minggu Ke II Bulan Juli
4	Dst.....						

.....Tanggal.....
PT/CV/UD/Toko/Perorangan

(.....)

CONTOH DAFTAR PENAWARAN HARGA OLEH PENYEDIA

Desa :..... Bidang :.....
 Kecamatan :..... Kegiatan :.....
 Kabupaten :..... Lokasi :.....
 Provinsi :.....

No	Uraian	Spesifikasi Teknis	Volume	Sat.	Harga Sat. (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jadwal Pengadaan
1	Batu Gunung / Kali		1	M3			Minggu Ke II Bulan Juli
2	Pasir Pasangan / Betonan / Beton		1	M3			Minggu Ke II Bulan Juli
3	Pasir urug		1	M3			Minggu Ke II Bulan Juli
4	Sirtu		1	M3			Minggu Ke II Bulan Juli
5	Dst....						

.....Tanggal.....
 PT/CV/UD/Toko/Perorangan

(.....)

CONTOH DAFTAR PENAWARAN HARGA OLEH PENYEDIA

Desa : Bidang :
 Kecamatan : Kegiatan :
 Kabupaten : Lokasi :
 Provinsi :

No	Uraian	Spesifikasi Teknis	Volume	Sat.	Harga Sat. (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jadwal Pengadaan
1	Semen 50 Kg		1	Sak			Minggu Ke II Bulan Juli
2	Besi Beton Dia 12 mm		1	Btg			Minggu Ke II Bulan Juli
3	Atap Seng Gelombang		1	Lmbr			Minggu Ke II Bulan Juli
4	Keramik 40 cm x 40 cm		1	Dos			Minggu Ke II Bulan Juli
5	Dst....						

.....Tanggal.....
 PT/CV/UD/Toko/Perorangan

(.....)

CONTOH DAFTAR PENAWARAN HARGA OLEH PENYEDIA

Desa :.....
 Kecamatan :.....
 Kabupaten :.....
 Provinsi :.....

Bidang :.....
 Kegiatan :.....
 Lokasi :.....

No	Uraian	Spesifikasi Teknis	Volume	Sat.	Harga Sat. (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jadwal Pengadaan
1	Mobilisasi/Demobilisasi		1	Unit			Minggu Ke II Bulan Juli
2	Excavator		1	Jam			Minggu Ke II Bulan Juli
3	Motor Greder		1	Jam			Minggu Ke II Bulan Juli
4	Vibrator Roller		1	Jam			Minggu Ke II Bulan Juli
5	Dst....						

.....Tanggal.....
 PT/CV/UD/Toko/Perorangan

(.....)

IX. Contoh Format Pengumuman Lelang

PENGUMUMAN LELANG
KEGIATAN BIDANG SUMBER ANGGARAN
DESA TAHUN ANGGARAN 20...

Nomor :

Sehubungan dengan kegiatan.....Tahun anggaran 20...maka kami bermaksud mengadakan lelang, dengan paket sebagai berikut:

No	Nama Paket	Nama TPK	Lokasi	Ruang Lingkup	Nilai HPS	Jangka Waktu pelaksanaan
1.	Pengadaan Bahan Toko	Ketua....	Dusun ...	Semen, Besi Beton Tripleks, dll	205.000.000,-	60 HK

Adapun persyaratan dan jadwal tahapan lelang *terlampir*

Desa....., (tanggal/bulan/Tahun)

Mengetahui,
Kasi/Kaur Desa
Selaku
PPKD

Ketua TPK
Desa

.....

.....

Lampiran Pengumuman Lelang

No:.....

Tanggal:.....

1. Persyaratan Penyedia

- a. Memiliki izin usaha
- b. NPWP
- c. dll (dapat dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku)

2. Jadwal

No	Tahapan	Tempat	Waktu	Ket
1.	Pengumuman Lelang	Kantor Desa/tgl/bln/thn s.d/tgl/bln/thn	
2.	Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang	Kantor Desa/tgl/bln/thn s.d/tgl/bln/thn	
3.	Pemasukan Dokumen Penawaran & Buka Sampul	Kantor Desa/tgl/bln/thn	Disaksikan oleh penyedia dan masyarakat
4.	Evaluasi Penawaran	Kantor Desa/tgl/bln/thn s.d/tgl/bln/thn	
5.	Negosiasi	Kantor Desa/tgl/bln/thn s.d/tgl/bln/thn	
6.	Penetapan pemenang	Kantor Desa/tgl/bln/thn	

Mengetahui,
Kasi/Kaur Desa
Selaku
PPKD

Ketua TPK
Desa

.....

.....

X. Contoh Format Evaluasi Penawaran

**EVALUASI PEANWARAN
KEGIATAN.....**

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
Nilai Paket :

No	Nama Penyedia	Surat Penawaran	Jadwal Pekerjaan	Surat Keterangan Kebersihan usaha	NPWP	Photo copy KTP	Ijin Usaha	Daftar Personil*	Daftar Peralatan*	Kesesuaian Teknis**	Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat	Harga Penawaran (Rp.)	Rengking
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Penyedia 1												
2	Penyedia 2												
3	Penyedia 3												
4	Dst												

Keterangan

v	Ada/memenuhi Syarat
-	Ada/Tidak memenuhi Syarat
x	Apabila tidak sesuai /Tidak ada Apabila diperlukan
*	Spesifikasi/Kelayakan Teknis
**	Diisi dengan jumlah penawaran
13	

TIM PELAKSANA KEGIATAN			
No	Nama	Jabatan	TTD
1			
2			
3			

XI. Contoh Format Undangan Negosiasi Harga

KOP PEMERINTAH DESA

.....,

Nomor : Kepada
Lamp. : Yth. (Penyedia Toko/UD /CV/PT)
Hal : **Undangan Negosiasi.** di -
.....

Menanggapi surat penawaran harga saudara Nomor..... tanggal
Hal Penawaran Harga, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut
:

1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga Saudara, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang saudara ajukan kami perlu melakukan negosiasi harga terhadap penawaran saudara tersebut.
2. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara besok pada :
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Acara : Negosiasi Harga

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kasi/Kaur Desa
Selaku
PPKD

Ketua TPK
Desa

.....

.....

XII. Contoh Format Berita Acara Negosiasi

BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA

NOMOR :

Kegiatan :

Pekerjaan :

Pada hari ini tanggal bulan tahun pada pukul dengan mengambil tempat di, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan negosiasi harga atas pekerjaan

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari PT/CV//UD/Toko/Perorangan

Pada saat negosiasi harga pihak penyedia barang/jasa yang dihadiri oleh Direktur/Pimpinan/Kuasa PT/CV//UD/Toko/Perorangan menyatakan bahwa pihak penyedia barang/jasa dari PT/CV//UD/Toko/Perorangan menyatakan telah menerima semua surat-surat yang berkaitan dengan proses pekerjaandengan hasil negosiasi sebagai berikut :

- besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh penyedia barang/jasa dari PT/CV//UD/Toko/Perorangan..... adalah sebesar Rp. (.....);
- adapun mengenai rincian dari jumlah penawaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam lampiran surat penawaran harga;
- hasil kesepakatan ini dituangkan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Spesifikasi Teknis	Volume	Sat.	Harga Sat. (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jadwal Pengadaan
1	Semen 50 Kg		1	Sak			Minggu Ke II Bulan Juli
2	Besi Beton Dia 12 mm		1	Btg			Minggu Ke II Bulan Juli
3	Atap Seng Gelombang		1	Lmbr			Minggu Ke II Bulan Juli
4	Keramik 40 cm x 40 cm		1	Dos			Minggu Ke II Bulan Juli
5	Dst....						

- Penetapan Pemenang Penyedia pelaksana pekerjaan sebagaimana tersebut di atas akan dituangkan lebih lanjut dalam Berita Acara penetapan pemenang Penawaran/Lelang*

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik,
(PT/CV/TOKO/UD)

Ketua TPK
Desa

.....

.....

Mengetahui,
Kasi/Kaur Desa
Selaku PPKD

.....

Contoh Format surat pemberitahuan Hasil Penawaran

KOP PEMERINTAH DESA

.....,

Nomor : Kepada
Lamp. : 1 (satu) berkas. Yth. (Penyedia Toko/UD /CV/PT)
Hal : **Pemberitahuan hasil** di -
penawaran/lelang*

Berdasarkan Berita Acara penetapan penawaran/lelang nomor :....., tanggal,.....20.. atas pekerjaan di desa..... kecamatan.....Kabupaten Kutai Timur, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

5. Penyedia Toko/UD /CV/PT..... dinyatakan sebagai pemenang/tidak menang*
6. Sebagai tindaklanjut, maka kami mengundang saudara Direktur/Pimpinan/Kuasa Toko/UD /CV/PT..... untuk menghadiri penandatanganan *Surat Perjanjian Kerja* yang dijadwalkan pada:
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
(hanya bagi pemenang)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kasi/Kaur
Selaku PPKD

Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Desa

.....

.....

Catatan:

*Coret yang tidak perlu

XIII. Contoh format Berita Acara Penetapan Pemenang Penawaran/Lelang

KOP DESA

BERITA ACARA HASIL PELELANGANAN

NO :
TANGGAL :

Bidang :
Sub. Bidang :
Pekerjaan :
Lokasi :
Tahun Anggaran :

Pada Hari ini.....Tanggal.....Tahun Dua Ribu Dua
..... Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) DesaKecamatan.....
Kabupaten Kutai Timur Tahun 202.., Telah selesai melaksanakan evaluasi administrasi
Teknis dan Harga Dokumen penawaran yang masuk pada pekerjaan tersebut di atas dengan
hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana perlunya.

TIM PELAKSANA KEGIATAN

	NAMA	JABATAN	TTD
1.	KETUA	(.....)
2.	SEKERTARIS	(.....)
3.	ANGGOTA	(.....)

XIV. Contoh Format Perjanjian

Lampiran : Surat
Nomor :
Tanggal :

SURAT PERJANJIAN KERJA
NOMOR :(Pemerintah Desa)

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan : Kasi/Kaur Pemerintah Desa
Alamat :
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik (PT/CV/TOKO/UD).....
Alamat :
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah

Pasal 2
NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. (.....).

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak, atau memerintahkan **PIHAK KEDUA** untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA** apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi harga antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil penawaran dan negosiasi harga antara **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah hari kerja sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal

Pasal 5
KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan *Kahar* maka **PIHAK KEDUA** memberitahukan tentang terjadinya keadaan *Kahar* kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan *Kahar* yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka **PARA PIHAK** terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.
- (2) Tidak termasuk keadaan *Kahar* adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan *Kahar* tidak dikenakan sanksi.
- (4) Setelah terjadinya keadaan *Kahar*, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam Perubahan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 6
SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa :

1. Peringatan/teguran tertulis;
2. Pembayaran denda sebesar % (*maksimal 0,1 % tergantung kesepakatan PARA PIHAK*) perhari dari nilai pekerjaan dengan nominal sebesar Rp. (dalam huruf Rupiah) dari keterlambatan.
3. Larangan mengikuti pengadaan barang dan jasa di desa selama 2 tahun berturut-turut.
4. Gugatan secara perdata, dan/atau;
5. Pelaporan secara pidana kepada Pihak yang berwenang.

Pasal 6
PEMUTUSAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerjasama apabila :
 - a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan **PIHAK KEDUA** sudah melampaui 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
 - b. **PIHAK KEDUA** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
 - c. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat yang langsung dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** dapat menunjuk pengadilan setempat untuk diselesaikan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk **PIHAK KEDUA** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MATERAI
(1 Rangkap
Untuk Pihak
Pertama)

MATERAI
(1 Rangkap
Untuk Pihak
Kedua)

.....
Mengetahui,
Kepala Desa
Selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa

.....

XV. Contoh Format Penyerahan Hasil Pekerjaan

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

.....,

Nomor : Kepada
Lamp. : 1 (satu) berkas Yth. Kasi/Kaur.....
Hal : **Penyerahan Hasil Pekerjaan** Desa
di -
.....

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor :, tanggal,
maka perlu kami sampaikan bahwa pekerjaan telah selesai
dan dengan ini kami kirimkan hasil pekerjaan untuk dapat diteliti apakah
sudah sesuai dengan spesifikasi teknis atau belum sebagaimana daftar
terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur/Pimpinan/Pemilik
(PT/CV/TOKO/UD)

.....

LAMPIRAN : SURAT
NOMOR :
TANGGAL:

DAFTAR HASIL PERKERJAAN

No.	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga Satuan	Kondisi	Jumlah Harga
1						
2						
Dst						
Jumlah						
Terbilang " dalam rupiah"						

Direktur/Pimpinan/Pemilik
(PT/CV/TOKO/UD)

.....

XVI. Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Khusus Konstruksi)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Pada Hari ini.....Tanggal.....Tahun Dua Ribu Dua Telah dilakukan pemeriksanaan/Opname pekerjaan Dengan item pekerjaan sebagai berikut:

- 1 Pekerjaan Galian
- 2 Pekerjaan Pas. Pondasi
- 3 Dst

Berdasarkan pemeriksanaan/Opname pekerjaan tersebut prosentase kemajuan pekerjaan mencapai...% (.....)

Format pemeriksaan/Opname pekerjaan *terlampir*

Demikian Berita Acara Opname Pekerjaan ini dibuat berdasarkan progress pekerjaan sampai tanggal berita acara ini

MENGETAHUI
KASI/KAUR

(.....)

DIBUAT
TPK

(.....)

XVII. Contoh Format Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Khusus Konstruksi)

FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN

Kegiatan :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Tanggal :
 Pekerjaan yang diperiksa :

No	Jenis Kegiatan	Sketsa Gambar	Jumlah Volume Yag di hasilkan	Ukuran Dimensi		Kualitas Pekerjaan		Rekomendasi
				Sesuai Rencana	Tidak	Sesuai	Tidak	
1	Pengadaan Indukan Sampi		30 Ekor	V				
2.	Dst							

Bahan dan Alat Yang diperiksa

No	Jenis Bahan dan Alat	Volume		Kualitas Pekerjaan		Catatan	Rekomendasi
		Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak		
1	Pengadaan Sampi Indukan						
2.	Dst						

MENGETAHUI
 KASI/KAUR

.....Tanggal.....
 TPK

(.....)

(.....)

XVIII. Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Khusus Non Konstruksi)

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN NON KONTRUKSI

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun 20....dilakukan pemeriksaan barang/jasa pekerjaan..... sesuai spesifikasi *terlampir*

Demikian Berita Acara dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Mengetahui
KASI/KAUR

Ketua TPK

(.....)

(.....)

XIX. Contoh Lampiran Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Khusus Non Konstruksi)

FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN NON KONSTRUKSI

Kegiatan :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Tanggal :
 Pekerjaan yang diperiksa :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah/Vol yg dicapai	Spesifikasi Teknis		Spesifikasi Teknis		Catatan Pemeriksaan	Rekomendasi
			Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak		
1	Pengadaan Sapi Indukan	30 Ekor	V		V			
2.	Dst							

Mengetahui
Kasi/Kaur

.....Tanggal.....
TPK

(.....)

(.....)

XX. Contoh Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, telah dilaksanakan Penerimaan Hasil Pekerjaan atas pekerjaan antara :

I. Nama :
Jabatan : Kasi/Kaur
Alamat :
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
Jabatan : Ketua TPK/Direktur/Pimpinan/Pemilik (PT/CV/TOKO/UD)*...
Alamat :
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa dalam keadaan baik kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : tertanggal

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan berupa dalam keadaan baik dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : tertanggal

Demikian Berita Acara ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik,
(PT/CV/TOKO/UD)

Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Desa

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Desa
Selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa

.....

XXI. Contoh Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

NOMOR :(Nomor Pemerintah Desa).....

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Balai Desa/Kantor Desa, telah dilaksanakan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) Hasil Pekerjaan yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa atas pekerjaan..... antara :

I. Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
Jabatan : Kasi/Kaur
Alamat :
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa dalam keadaan baik kepada **PIHAK PERTAMA** dengan rincian :

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan berupa dalam keadaan baik dari **PIHAK KEDUA**

Dengan nilai pekerjaan sebesar Rp..... (dengan huruf).

Demikian Berita Acara ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DESA

PIHAK KEDUA
Kasi/Kaur

.....

.....

XXII. Contoh Format Berita Acara Musyawarah Desa Pembangunan Desa

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa tahun anggaran di Desa.....
Kecamatan KabupatenProvinsi maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m : dari pukul.....s.d. pukul
Tempat :

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka Pertanggungjawaban Kegiatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat, desa serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Laporan pelaksanaan kegiatan;
2. Tanggapan/ masukan masyarakat atas laporan pelaksanaan kegiatan;
3. Pembahasan tanggapan dan masukan masyarakat;
4. Merumuskan tindaklanjut tanggapan dan masukan masyarakat;
5. Penandatanganan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan dari Kaur/Kasi kepada Kepala Desa
6. Dst.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : dari

Sekretaris / Notulis : dari

Narasumber : 1.dari

2.dari

3.dari

4.dari

5.dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Dst.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....Tanggal,.....,,.....

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

Wakil Masyarakat

Wakil Masyarakat

(.....)

(.....)

(.....)

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
Dst				

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

Ketua BPD

(.....)

XXIII. Contoh Format Pengumuman Hasil Pekerjaan

**PENGUMUMAN HASIL PEKERJAAN SWAKELOLA KEGIATAN
SUMBER ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20.....**

NOMOR :

Nama Kegiatan	Nilai Pengadaan	Keluaran/ Out Put		Kasi/Kaur/TPK	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
		volume	Satuan			
.....	Rp.	Kasi/Kaur..... atau TPK terdiri dari : Ketua Sekretaris Anggota	Desa..../ Dusun ..	Mulai tanggal .../.../20.. sampai dengan tanggal .../.../20...

....., (tanggal/Bulan/Tahun)

Kepala Desa
Selaku PKPKD

Kasi / Kaur
Selaku PPKD

(.....)

(.....)

**PENGUMUMAN HASIL PEKERJAAN PENYEDIA MELALUI PERMINTAAN
PENAWARAN/LELANG
KEGIATAN BIDANG SUMBER ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20....**

NOMOR :

NAMA PENYEDIA	JENIS PEKERJAAN	NILAI PEKERJAAN
(Nama Usaha/Toko/UD/CV/PT	Pembangunan/Pengadaan	Rp. (tulis dengan huruf)

....., (tanggal/Bulan/Tahun)

Kepala Desa
Selaku PKPKD

KETUA TPK
Desa

(.....)

(.....)

XXIV. Contoh Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan

KOP DESA

.....,

Nomor : Kepada
Lamp. : 1 (satu) berkas Yth. Kasi/Kaur
Hal : **Laporan Hasil Pekerjaan.** di -

.....

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : Tahun.... tentang Pembentukan Tim Pelaksanaa Kegiatan, maka dengan ini kami laporkan bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan pada tanggal..... Adapun dokumen pelaksanaan kegiatan bahan laporan Kami serahkan sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ketua TPK
Desa

.....

Lampiran : Surat TPK
Nomor :
Tanggal :


DFAFTAR LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
..... TAHUN ANGGARAN

NO	JENIS SURAT	NOMOR SURAT	TANGGAL SURAT
1.	Surat/.../...../...../20....
2. dst..... dst dst

Ketua TPK
Desa

.....

BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR